

BAB III
GAMBARAN UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM (BLU) UIN WALISONGO SEMARANG

A. Profil Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Layanan Umum UIN Walisongo Semarang

1. Landasan Keberadaan Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Status PPK-BLU diberikan ketika Universitas Islam Negeri Walisongo masih berstatus Institut Agama Islam Negeri Walisongo Penetapan status PPK-BLU UIN Walisongo didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KMK.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Seiring dengan perkembangan pada tahun 2014 IAIN Walisongo beralih status menjadi UIN Walisongo Semarang. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 130 tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo Semarang.

Setelah ditetapkan sebagai PK-BLU UIN Walisongo Semarang yang pada saat itu masih berstatus sebagai IAIN Walisongo memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan secara fleksibel, yakni dapat menggunakan langsung dana pendapatan dari masyarakat tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara, serta dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain, juga melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Menteri Keuangan yang semuanya dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal.

UIN Walisongo yang pada saat itu masih berstatus IAIN secara resmi berdiri pada hari Senin Wage tanggal 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI (KH.M. Dachlan) No. 30 dan 31 tahun 1970. Pada awal berdirinya, Pendidikan Tinggi Agama Islam ini memiliki 4 fakultas, yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah yaitu Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari'ah di Bumiayu, Fakultas Syari'ah di Demak, Fakultas Ushuluddin di Kudus dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Namun demikian, ide dan upaya perintisannya telah dilakukan sejak tahun 1963, melalui pendirian fakultas-fakultas Agama Islam di beberapa daerah tersebut yang dilakukan secara sporadis oleh para ulama sebagai representasi pemimpin agama dan para birokrat santri.

Keberadaan IAIN Walisongo pada awalnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan riil masyarakat santri di Jawa Tengah akan terselenggaranya lembaga pendidikan tinggi yang menjadi wadah pendidikan pasca pesantren. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah adalah daerah yang memiliki basis pesantren yang sangat besar. Dengan demikian di satu sisi lembaga pendidikan tinggi ini harus mampu memposisikan diri sebagai penerus tradisi pesantren, sementara di sisi lain ia harus memerankan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melakukan kajian dan diseminasi keilmuan, sebagaimana layaknya perguruan tinggi.

Para pendiri IAIN ini secara sadar memberi nama Walisongo. Nama besar ini menjadi simbol sekaligus spirit bagi dinamika sejarah perguruan tinggi keagamaan Islam terbesar di Jawa Tengah ini dalam pergulatan meneruskan tradisi dan cita-cita Islam inklusif ala Walisongo yang secara terus menerus menjadi rujukan yang terbuka bagi dilakukannya tafsir ulang dalam dunia pemikiran keislaman yang diolah secara cerdas dan kritis dalam bentang panjang *continuity and change*. Spirit inilah yang dikembangkan menuju UIN Walisongo sebagai *center of excellence* perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

Dari spirit diatas, UIN Walisongo sebagai salah satu model penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memerlukan infrastruktur yang memadai dalam upaya memenuhi segala kebutuhan pelaksanaan akademik dan penunjang akademik yang mendukung kelancaran pencapaian penyelenggaraan perguruan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan tinggi, maka UIN Walisongo melakukan langkah-langkah yang strategis dalam upaya meningkatkan manajemen yang berbasis kinerja, prima dalam pelayanan dan kualitas kinerja *educational entrepreneurship*. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah mengakomodir aspirasi dimaksud, menjelaskan bahwa Satuan Kerja (Satker) yang berfungsi sebagai pelayanan publik diijinkan untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari masyarakat dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Oleh karenanya, UIN Walisongo sebagai satuan kerja pemerintah dalam rangka efisiensi dan produktifitas dengan basis *Public Customer Services Oriented* (PCSO) sudah sepatutnya menyesuaikan diri dengan sistem pengelolaan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2003, dengan mengajukan usulan untuk bisa mengelola keuangan negara yang bersumber dari masyarakat

dimaksud yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja UIN Walisongo menjadi PPK-BLU.

Kebutuhan pengembangan institusi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UIN Walisongo yang paling mendasar adalah terpenuhinya kebutuhan dan kelengkapan asset-aset kekayaan negara yang harus dimiliki oleh lembaga perguruan tinggi ini. Tentunya dalam pengelolaan kekayaan negara yang dimiliki tersebut, perlu disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang ada maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh UIN Walisongo sendiri. Salah satu mekanisme pengelolaan kekayaan negara dalam bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna adalah mengacu kepada PP No. 6/2006. Ketentuan ini selanjutnya dapat dijadikan dasar Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.¹

Sehubungan dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan diatas, maka ada bagian di dalam Badan Layanan Umum UIN Walisongo yang ditunjuk untuk mengelola serta bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan keuangan. Bagian tersebut adalah bagian perencanaan dan keuangan BLU UIN Walisongo. Bagian perencanaan dan keuangan ini masuk dalam Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Biro AUPK mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, administrasi keuangan, peraturan perundang - undangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.²

¹Rencana Bisnis..., h. 1-3

²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 54 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang Pasal 36

2. Karakteristik Bisnis Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab I Pasal 1 item 23 disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Pada Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dijelaskan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (1) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara / daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan, (2) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dijadikan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan, (3) pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja yang perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Perkembangan jumlah unit layanan UIN Walisongo setelah menjadi BLU terdiri dari: fakultas, pascasarjana, biro administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga penjamin mutu, unit pelaksana teknis, satuan pemeriksa internal. Melihat perkembangan tersebut BLU UIN Walisongo telah melakukan layannya kepada masyarakat baik layanan pokok berupa pendidikan dan layanan non pendidikan antara lain :

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan kepada masyarakat dimaksud berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada efisiensi dan produktivitas. Peningkatan pelayanan itu meliputi: peningkatan pelayanan pemangku kepentingan (*stake holders*), pelayanan manajemen administrasi dan keuangan, pelayanan proses pendidikan dan pembelajaran, pengembangan etos dan budaya kerja.
- b) Fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas yang memberikan keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- c) Penerapan praktek bisnis yang sehat yaitu proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.³

3. Data SWOT Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

IAIN Walisongo memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dengan mengedepankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dengan baik. Sistem pengawasan berkala dan sustainable adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk IAIN Walisongo dalam menjalankan prinsip *Good of Clean Governance* pada seluruh aspek, termasuk aspek pengelolaan

³Rencana Bisnis,...h. 3-5

keuangan. IAIN Walisongo adalah sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerima pendapatan dari masyarakat. Untuk tetap menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya diupayakan peningkatan kontribusi pendapatan dari masyarakat melalui unit usaha pendanaan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran-sasaran yang dituju adalah (1) meningkatkan kualitas sistem informasi keuangan, (2) meningkatkan sistem pengawasan keuangan, (3) meningkatkan profitabilitas unit-unit usaha, (4) meningkatkan pendanaan dari kemitraan kerjasama luar negeri dan (5) meningkatkan pendanaan dari pemerintah dan swadaya.

Jika digunakan SWOT terhadap kondisi sumber dana sekarang, maka akan didapatkan rumusan sebagai berikut :

No	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
1.	Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan “layak jual” jika dikelola secara profesional	Menggantungkan dana dari pemerintah
2.	Memiliki tim aset IAIN yang diberi otoritas untuk mengelola aset secara profesional	Menurunnya idealisme dan berkembangnya pragmatisme di kalangan mahasiswa
3.	Memiliki produk layanan publik yang beragam dan produktif	Sarana dan prasarana belum dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan IAIN
4.	Letak geografis IAIN Walisongo yang sangat	Produk-produk keilmuan belum secara optimal

strategis sehingga memiliki “ <i>Marketable Value</i> ”	diorientasikan untuk kepentingan profit bagi kepentingan IAIN ⁴
---	--

No	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Tantangan)
1.	Kesempatan untuk membangun kerjasama (<i>networking</i>) yang berkonsekwensi pendapatan (finansial) bagi IAIN terbuka sangat lebar	Era pasar bebas menuntut perguruan tinggi semakin kompetitif
2.	Tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkonsekwensi pendapatan (finansial) bagi IAIN	Rendahnya daya beli masyarakat berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam anggaran pendidikan
3.	Pemerintah memberi kesempatan pada perguruan tinggi untuk semakin mandiri	Masyarakat semakin selektif dalam memilih produk pengetahuan
4.	Kebijakan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN memungkinkan peningkatan dana pendidikan yang signifikan	Masyarakat menuntut pengelolaan layanan publik dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel
5.	Diterapkannya olah PPK-BLU yang memberi fleksibilitas	

	dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ⁵	
--	---	--

4. Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran
- b. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran
- c. Pelaksanaan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan
- d. Pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)
- e. Pelaksanaan akuntansi BLU
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan⁶

5. Subbagian pada Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran, penyiapan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
- b. Subbagian Keuangan dan BMN
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Subbagian Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran

⁵*Ibid*, h. 30

⁶Peraturan,... Pasal 44

Subbagian ini mempunyai tugas melakukan evaluasi, pelaporan program dan anggaran.⁷

B. Visi dan Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Visi dan Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan ini masih belum di *update*, karena pada tahun 2012 bernama bagian perencanaan dan sistem informasi (PERSINFO).

Visi :

“Menjadi salah satu bagian terdepan dalam pelayanan perencanaan dan sistem informasi yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas”

Misi :

1. Mengembangkan manajemen penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan sistem informasi secara profesional.
2. Memberikan layanan di bidang perencanaan dan sistem informasi berbasis teknologi informasi dengan tepat dan cepat serta akurat.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit kerja dalam penyusunan rencana dan program kerja serta data informasi yang akurat.
4. Melakukakan koordinasi dan evaluasi terhadap rencana dan program kerja unit di lingkungan IAIN sebagai bahan penyusun kebijakan.
5. Mengkoordinir bahan laporan dari unit-unit dan menyusun pelaporan kinerja.⁸

C. Susunan Pejabat Pengelola Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

⁷Peraturan,... Pasal 45-46

⁸<http://www.walisongo.ac.id/?p=lembaga&bag=3.2>, diakses 21 Oktober 2016

Jabatan	Nama
Rektor	Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Biro AUPK	Priyono, M.Pd
Kepala Bagian (Kabag)	H. Muntoha, S.Ag.,MM
Kasubbag. Perencanaan	Nuryanta, SH
Kasubbag. Keuangan dan BMN	Munfa'ati, S.Pd.I.,MM
Kasubbag. Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran	Fadlol, SE
Pengolah Daftar Gaji	Umiroh, ST
Bendahara Penerimaan / Bendahara BLU	Mokhammad Kharisun, S.HI
Petugas BMN	Ghulam Hamidi
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLU	Hj. Istiqomah, SE
Pengadministrasi	Sutarja
Petugas SAI	Lu'luatil Mufidah, SE
Bendahara Pengeluaran	Lilik Yulianto, ST
Bendahara Pengeluaran Pembantu	Siti Asrofi
Pengolah Bahan Perencanaan	Supriyono, SE
Aplikasi SPM	Farid Ma'ruf
Penyaji Bahan	Teguh Pristiwanto

Administrasi RM	Muhammad Zaenuri
Administrasi BLU	Umi Robiah
Adminitrasi Keuangan	Zahrotul Mila

D. Sistem Informasi Manajemen Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Sistem informasi manajemen yang digunakan pada bagian perencanaan dan keuangan BLU UIN Walisongo Semarang yaitu Sistem Informasi Realisasi Anggaran (SIRA). Sistem Informasi Realisasi Anggaran adalah sebuah aplikasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja akan sebuah aplikasi yang mampu menjadi alat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara yang efisien, efektif, dapat diandalkan dan *user friendly*. Sistem ini mempunyai 5 sub sistem antara lain administrator, operator, perjalanan dinas, pembukuan bendahara pengeluaran dan pembukuan bendahara pengeluaran pembantu.

Subsistem Administrator merupakan pengelola dari sistem secara keseluruhan ditempatkan pada bagian keuangan satuan kerja sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan anggaran. Subsistem Operator ditempatkan di setiap bagian sebagai pelaksana anggaran yang dapat menghasilkan output kuitansi, SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja), SPP (Surat Perintah Pembayar), resume kontrak dan realisasi masing-masing bagian. Subsistem Perjalanan Dinas ditempatkan disetiap bagian sebagai aplikasi yang mengelola dokumen perjalanan dinas. Subsistem Bendahara Pengeluaran ditujukan untuk bendahara pengeluaran dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembukuan. Sedangkan subsistem Bendahara Pengeluaran Pembantu ditujukan untuk memudahkan bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan pembukuan.⁹

⁹Manual Book Operator SPPD

Menurut Bapak Lilik Yulianto, ST dalam keterangannya pada peneliti mengungkapkan :

“Sistem informasi yang digunakan pada bagian perencanaan dan keuangan ini yaitu SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran). Tujuan SIRA ini agar lebih terkontrol dalam penganggaran. Dulu ketika masih manual memakai Ms. Excel kita tidak bisa memonitoring penganggaran. SIRA ini mengadopsi dari pendis pusat, namun tidak semua kemenag menggunakan SIRA. Semua komponen yang ada pada SPJ bisa dibuat lewat SIRA. *User*nya, untuk admin saya sendiri, pimpinan untuk memonitoring realisasi anggaran masing-masing fakultas maupun pusat, operator per unit fakultas juga ada, *user* BPP untuk mengeluarkan SPP dan SPM. *Software* ini customisasi, maksudnya SIRA ini masih butuh pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. SIRA ini memonitoring realisasinya berapa, prosentasenya berapa untuk mengejar atau mempercepat pencairan supaya setiap fakultas sesuai dengan matriks jadwal pencairannya. Ada ketidaksesuaian yang terjadi biasanya ketika mereka sudah input lama tapi belum dicair-cairkan. Itu semua tergantung mereka, tapi ketika kita monitoring karena sudah diinput jadi terkadang sudah masuk dalam realisasi. Jadi ada selisih antara realisasi yang sudah benar-benar cair dengan yang baru diinput. Ketika sudah jadi SPP biasanya sudah sampai sini, namun terkadang ketika sudah jadi SPP berkasnya masih di SPI atau masih dipegang operatornya. Akan tetapi karena sudah diinput di SIRA biasanya ada GAP waktu sekitar satu minggu. Jadi, ada realisasi berbeda dengan pencairan riilnya. Kedepannya memang untuk perbaikan kualitas SIRA ini akan diadakan pelatihan bagi SDM serta pengembangan dari SIRA sendiri.”¹⁰

Sejalan dengan penjelasan diatas, Bapak H. Muntoha, S.Ag, MM selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang menerangkan :

“SIRA ini saya gunakan untuk monitoring terkait berapa persen serapan yang harus kita target. Ini di SIRA harusnya sudah pencairan tapi kok belum, ternyata ini masih ada verifikasi (proses secara manual). Monitoring yang lain dengan sistem kita minta laporan tri wulan dari masing-masing bagian atau fakultas.”¹¹

¹⁰Wawancara dengan Lilik Yulianto, ST, Bendahara Pengeluaran Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang, 17 Oktober 2016

¹¹Wawancara dengan H. Muntoha, S.Ag., MM, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang, 25 Oktober 2016

E. Pengambilan Keputusan Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Dalam melakukan pengambilan keputusan pada bagian perencanaan dan keuangan BLU UIN Walisongo, selalu melakukan rapat koordinasi.

Bapak H. Muntoha, S.Ag., MM selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memberi penjelasan pada peneliti :

“Pengambilan keputusan disini sebenarnya levelnya bukan Kabag, tapi Pak Biro atau Pak Rektor. Biasanya segala sesuatu dicari dulu aturannya, kalau kebetulan ada suatu kegiatan yang belum dipayungi hukum maka akan dicarikan solusi melalui kebijakan rektor. Dalam monitoring dan pengambilan keputusan kita selalu melakukan rapat koordinasi. Untuk BPP 2 bulan sekali, untuk rapat koordinasi di tingkat Kabag dengan Pak Biro target 1 minggu sekali, maksimal 2 minggu sekali. Untuk tingkat pimpinan (Pak Biro, Dekan, Rektor, Wakil Rektor) setiap hari senin, kalau Kabag dengan Pak Biro hari selasa, kalau kita khusus di lingkungan sini biasanya hari rabu. Jika hari yang biasanya ada acara yang lebih penting, maka dicarikan hari ganti untuk rapat koordinasi. Sehingga informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pegawai BLU dapat tersalurkan melalui rapat koordinasi tersebut.”¹²

F. Peranan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang

Dalam proses pengambilan keputusan di bagian perencanaan dan keuangan BLU UIN Walisongo selalu memanfaatkan sistem informasi manajemen yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Muntoha, S.Ag., MM selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan BLU UIN Walisongo Semarang :

“Peranan dari SIRA yang sudah ada itu multiguna, Pak Rektor pun sebetulnya bisa melihat langsung, namun sempat atau tidaknya itu yang kita tidak mengetahui. Biasanya juga menanyakan langsung kepada bagian keuangan atau di Wakil Rektor 2. Aplikasi SIRA ini ada yang khusus untuk tingkatan pimpinan, untuk pelaksana sendiri. Jadi ketika Pak Rektor melihat langsung serapannya masih sekian persen, bisa untuk evaluasi dan bisa untuk mengambil keputusan. Kepala Biro pun juga bisa

¹²*Ibid*

melihat secara keseluruhan lewat SIRA. Bagian Perencanaan dan Keuangan itu kan hanya sebagai pengendali sehingga bisa melihat secara keseluruhan dengan kita memiliki aksesnya melalui SIRA tersebut.”¹³

¹³*Ibid*